

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini, teknologi informasi berkembang dengan pesat, memungkinkan penerapan berbagai sistem yang mendukung pembangunan. Salah satu bidang yang terdampak adalah pembangunan di wilayah pemerintahan desa, termasuk dalam upaya meningkatkan potensi wisata di daerah. Pemerintah sering merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sistem berbasis teknologi ini dapat membantu pekerjaan manusia, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan di institusi pemerintahan, sehingga proses alokasi bantuan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran (Putri et al., 2023).

Metode *Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA) adalah salah satu pendekatan yang efisien dan relevan dalam melakukan perhitungan untuk pengambilan keputusan, termasuk pada penentuan pemberian bantuan pembangunan. Metode MOORA ini dapat menyeleksi kriteria yang saling bertentangan antara kriteria *benefit* dan kriteria *cost*. *Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA) merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan banyak kriteria. Metode MOORA menggabungkan kriteria yang saling mendukung (*benefit*) dan kriteria yang berlawanan (*cost*) untuk menentukan

keputusan optimal dengan membandingkan rasio nilai dari setiap alternatif terhadap kriteria yang ditetapkan (Adinda Mayang Mentari et al., 2024).

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (DISPARPORA) disusun sebagai dasar dalam menjalankan kewenangan daerah di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga. Peraturan ini mendefinisikan peran strategis DISPARPORA Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam meningkatkan daya tarik wisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta pemberdayaan pemuda dan olahraga di wilayah tersebut. DISPARPORA bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam mengoptimalkan pengembangan pariwisata terutama wisata desa dibutuhkan bantuan pembangunan yang merata dan tepat sasaran untuk mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai elemen penting dalam pembangunan sosial-ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bantuan pembangunan wisata desa adalah salah satu dukungan untuk mendorong sosial-ekonomi desa-desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sehingga setiap bantuan pembangunan diberikan oleh pihak DISPARPORA dapat tersebar dengan rata dan tepat sasaran. Agar pengelolaan bantuan pembangunan desa wisata setiap daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terpenuhi untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan DISPARPORA maka diperlukan penentuan pemberian bantuan infrastruktur wisata ke desa yang layak menerima bantuan.

Upaya dalam menentukan kelayakan desa untuk menerima bantuan pembangunan wisata desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sangat penting

untuk mempertimbangkan berbagai aspek agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat. Pihak DISPARPORA menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan relevansi infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, pemerintah daerah atau DISPARPORA memilih penerima bantuan atau desa-desa yang kompeten dan berpotensi besar untuk memajukan sektor pariwisata desa. Proses penentuan pemberian bantuan harus mempertimbangkan beberapa kriteria seperti ketersediaan lahan, Legalitas Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), kelengkapan dokumen, potensi dan keunggulan desa, dan lainnya. Menurut (Fadhilah N et al., 2023), pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pembangunan di sektor pariwisata, khususnya wisata bahari dan budaya. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan strategi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai hasil pembangunan yang optimal, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebaiknya menerapkan strategi penentuan pemberian penerima bantuan berdasarkan kriteria yang terukur dan relevan guna menjamin kualitas dan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Saat ini, pemilihan untuk penerima bantuan pembangunan sering kali dilakukan berdasarkan daerah atau desa mana yang sering mengusulkan bantuan ke pihak DISPARPORA tanpa menggunakan kriteria yang sistematis. Hal ini menyebabkan pembangunan tidak selalu memenuhi kebutuhan utama wisata desa secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan

berbasis Metode MOORA yang dapat membantu dalam memilih penerima bantuan secara lebih objektif dan tepat sasaran.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *Decision Support System* merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pembuat keputusan dalam menangani masalah yang tidak terstruktur dengan menyediakan informasi yang relevan, mendukung analisis, dan menawarkan berbagai alternatif solusi (Surya Mahendra, 2023). Dengan menggunakan sistem pendukung keputusan DISPARPORA dapat membantu dalam memilih bantuan pembangunan wisata desa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode *Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA) diharapkan dapat membantu DISPARPORA dalam penentuan pemberian bantuan pembangunan wisata desa. Metode MOORA digunakan untuk menentukan kelayakan alternatif dengan membandingkan satu alternatif dengan yang lainnya melalui perhitungan perbandingan rasio untuk setiap kriteria. Proses ini membantu menemukan alternatif terbaik berdasarkan bobot preferensi, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam memilih opsi optimal dari berbagai pilihan.

Penelitian terdahulu bisa digunakan sebagai panduan dalam membangun sistem, dirujuk pada penelitian (Putri et al., 2023), menghasilkan kesimpulan bahwa sistem ini membantu menentukan proyek pembangunan yang diprioritaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jembatan di RW 01 dengan kode A1 memperoleh nilai tertinggi dan menduduki peringkat pertama. Temuan ini memungkinkan kepala desa dan perangkat desa untuk membuat keputusan yang tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah penggunaan metode MOORA untuk menentukan prioritas dalam penentuan

pemberian bantuan pembangunan desa yang layak diberikan, dan dapat diterapkan juga untuk infrastruktur wisata desa.

Penelitian lainnya oleh (Sitohang et al., 2021) menunjukkan bahwa, aplikasi yang dikembangkan berfungsi sesuai rancangan dan mendapatkan tingkat kepuasan pengguna 86,5%. Sistem berbasis metode ELECTRE ini menghasilkan nilai-nilai preferensi untuk menentukan prioritas lokasi pembangunan, memudahkan perangkat desa dalam pengambilan keputusan dan dokumentasi. Penelitian tersebut serupa dengan penelitian ini dengan tujuan yang sama yaitu membantu pengambilan keputusan untuk prioritas pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kedua penelitian juga menggunakan teknologi berbasis web untuk memudahkan akses data bagi instansi terkait.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas peneliti mendapat inspirasi untuk merancang sebuah sistem pendukung keputusan berbasis website yang nantinya dapat digunakan DISPARPORA dalam melakukan penentuan pemberian bantuan pembangunan wisata desa dengan menerapkan metode *Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA) yang dibuat dalam bentuk karya tulis skripsi yang berjudul : **“PENERAPAN METODE MOORA DALAM MENENTUKAN BANTUAN PEMBANGUNAN WISATA DESA DI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI BERBASIS WEB”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan langkah awal dalam proses penelitian atau penyelidikan ilmiah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode *Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menentukan pemberian bantuan pembangunan wisata desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Bagaimana cara merancang dan mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis web dengan metode MOORA untuk membantu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dalam menentukan pemberian bantuan pembangunan wisata desa secara tepat sasaran?
3. Bagaimana implementasi sistem pendukung keputusan berbasis web dengan metode MOORA menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *database* MySQL untuk menghasilkan keputusan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga yang objektif, optimal, dan tepat sasaran dalam menentukan pemberian bantuan pembangunan wisata desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai?

1.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap suatu pertanyaan penelitian atau pernyataan yang diusulkan sebagai dasar untuk pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini dapat membantu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menentukan prioritas desa yang layak menerima bantuan pembangunan wisata berdasarkan potensi yang ada, dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

2. Diharapkan bahwa sistem pendukung keputusan yang menggunakan metode *Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA) dan diimplementasikan dalam bahasa pemrograman PHP serta database MySQL akan membantu mengalokasikan pemberian bantuan pembangunan wisata yang tepat sasaran di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Mentawai.
3. Diharapkan penggunaan *Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA) dapat mempermudah proses pengambilan keputusan dalam menilai dan menentukan bantuan pembangunan wisata yang optimal dan tepat sasaran.

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan diperlukan ketika meneliti suatu masalah. Berdasarkan apa yang telah ditemukan, penyajiannya lebih tepat sasaran dan terarah. Oleh karena itu, penulis membatasi permasalahan ini pada hal-hal berikut :

1. Sumber data Alternatif dan Kriteria, serta informasi lainnya diperoleh dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Data Alternatif hanya sebatas kawasan desa wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Data Kriteria yang digunakan hanya sebatas kriteria desa wisata yang layak yang diberikan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MYSQL dalam berbasis web.

5. Fokus utama adalah pada penerapan metode MOORA untuk menentukan prioritas desa yang layak mendapatkan bantuan pembangunan wisata, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan panduan mendefinisikan alasan penelitian dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, dan cara penelitian akan dilakukan. Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan metode *Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menentukan pemberian bantuan pembangunan wisata desa yang optimal di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Merancang dan mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis web dengan metode MOORA untuk membantu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dalam menentukan pemberian bantuan pembangunan wisata desa secara tepat sasaran.
3. Mengimplementasikan sistem pendukung keputusan berbasis web dengan metode MOORA menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *database* MySQL untuk menghasilkan keputusan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga yang objektif, optimal, dan tepat sasaran dalam menentukan pemberian bantuan pembangunan wisata desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki manfaat dan kontribusi yang berbagai macam, terutama penelitian yang dilakukan memiliki DISPARPORA, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi instansi
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kemudahan bagi DISPARPORA dalam melakukan pengalokasian pemberian bantuan pembangunan wisata desa yang optimal.
 - b. Diharapkan menjadi panduan bagi DISPARPORA dalam melakukan penentuan pemberian bantuan pembangunan ke wisata desa dengan tepat sasaran berdasarkan kriteria yang relevan.
2. Manfaat bagi peneliti
 - a. Peneliti memiliki kemampuan untuk membuat sistem perangkat lunak yang dapat membantu DISPARPORA dalam penentuan pemberian penentuan pemberian bantuan pembangunan wisata desa yang optimal.
 - b. Sebagai salah satu syarat kelulusan strata satu (S1), sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
 - c. Sebagai salah satu cara penerapan ilmu-ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan.

1.7 Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai

Gambaran umum perusahaan penulis mendapatkan data melalui metode obeservasi, wawancara, dan studi literatur. Dari hasil tersebut penulis mendapatkan data primer. Pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang instansi yang terkait yang merupakan objek penelitian, mulai dari sejarah singkat, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi.

1.7.1 Sejarah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan strategis dalam pengembangan sektor pariwisata, pemuda, dan olahraga di wilayah tersebut. Keberadaan DISPARPORA diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2022, yang menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas. Pembentukan DISPARPORA berawal dari upaya pemerintah untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga.

Tujuan pembentukan ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempromosikan potensi wisata, serta mengembangkan sektor pemuda dan olahraga. Penyesuaian dengan kebijakan dan peraturan tingkat provinsi dan nasional juga menjadi bagian dari proses pembentukan dinas.

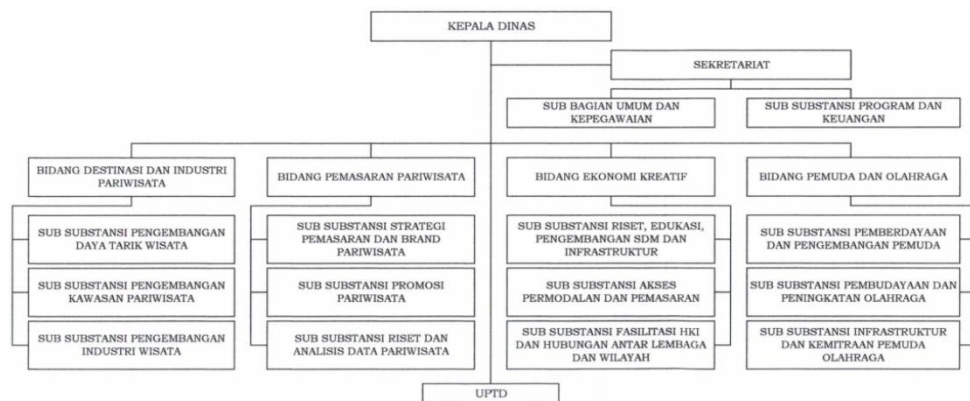
Seiring perkembangan daerah, pariwisata menjadi sektor unggulan, sementara pemuda dan olahraga berperan penting dalam pembangunan sosial. DISPARPORA dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan bidang dan sub-bagian khusus, DISPARPORA mendukung pengembangan pariwisata, pemuda, dan olahraga secara efektif. Selain penyelenggaraan kebijakan, DISPARPORA juga berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk keterpaduan program. DISPARPORA menjalin kerja sama dengan instansi lain guna mendukung keberhasilan program yang direncanakan.

1.7.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai

Struktur organisasi DISPARPORA Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kerangka kerja formal yang mengatur tata letak dan hubungan dalam perusahaan. Struktur organisasi ini melibatkan pengaturan dan pengelompokan orang, tugas, dan otoritas untuk mencapai tujuan perusahaan dengan efisien.

Struktur dari DISPARPORA Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :



(Sumber : DISPARPORA Kabupaten Kepulauan Mentawai)

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DISPARPORA Kepulauan Mentawai

1.7.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai

Uraian tugas dan fungsi adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik sebagai akibat dari jabatan yang dimilikinya maupun diberikan oleh pihak lain. Tugas merujuk pada aktivitas, pekerjaan, atau kegiatan yang harus dilakukan oleh individu. Sedangkan fungsi mengacu pada tujuan atau peran lebih umum yang dimainkan oleh seseorang dalam perusahaan. Adapun tugas dan fungsi ini mengacu pada struktur organisasi DISPARPORA Kabupaten Kepulauan Mentawai berikut ini:

1. Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Membantu Bupati dalam menjalankan pemerintahan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - 2) Merumuskan kebijakan peningkatan dan pengembangan dalam Dinas.
 - 3) Membuat pedoman kerja sebagai acuan tugas.
 - 4) Mengkoordinasikan program dengan OPD lain untuk sinergi kerja.
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional.

- 6) Mengkoordinasikan kebijakan dengan OPD lain.
- 7) Menjalin kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja.
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan.
- 9) Menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.

2. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan fungsi pendukung di bidang perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana, koordinasi tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi untuk seluruh bagian di Dinas.
- b. Menjalankan fungsi:
 - 1) Menyusun dan menyiapkan Rencana Strategis Dinas berdasarkan kesekretariatan dan prioritas bidang.
 - 2) Menyusun dan menyiapkan Rencana Kerja Tahunan untuk peningkatan dan pengembangan kebijakan.
 - 3) Menyusun pedoman kerja sebagai acuan tugas.
 - 4) Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Substansi.
 - 5) Berkoordinasi dengan Sekretariat OPD lain untuk sinergi kerja.
 - 6) Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas.

- 7) Memberikan petunjuk, penilaian, dan pembinaan kepada Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator.
 - 8) Mengevaluasi program sekretariat untuk mengetahui pencapaian dan permasalahan.
 - 9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
 - 10) Menjalankan tugas lain dari atasan sesuai fungsi dan tugasnya Sub Bagian dan Sub Koordinator.
3. Bagian Umum dan Kepegawaian tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
 - b. Menjalankan fungsi:
 - 1) Menyiapkan rencana program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan anggaran.
 - 2) Menyiapkan rencana sub kegiatan untuk Rencana Strategis Dinas.
 - 3) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program.
 - 5) Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan.
 - 6) Membimbing, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
 - 7) Memberikan petunjuk, penilaian, dan pembinaan kepada bawahan.
 - 8) Mengevaluasi kegiatan untuk mengetahui pencapaian dan menyelesaikan masalah yang muncul.

- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai fungsi dan tugasnya.
4. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata, dan industri pariwisata.
 - b. Menjalankan fungsi:
 - 1) Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan bidang.
 - 2) Merumuskan kebijakan pengembangan daya tarik dan kawasan pariwisata serta industri pariwisata.
 - 3) Mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan.
 - 4) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan.
 - 5) Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan.
 - 6) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi.
 - 7) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang.
 - 8) Mengelola administrasi bidang.
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai fungsi.

5. Bidang Pemasaran Pariwisata tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata, serta riset dan analisis data pariwisata.
- b. Menjalankan fungsi:
 - 1) Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan bidang.
 - 2) Merumuskan kebijakan dalam strategi pemasaran, brand pariwisata, promosi, serta riset dan analisis data.
 - 3) Mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan.
 - 4) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pemasaran.
 - 5) Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan.
 - 6) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi.
 - 7) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang.
 - 8) Mengelola administrasi bidang.
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai fungsi.

6. Bidang Ekonomi Kreatif tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah.

b. Menjalankan fungsi:

- 1) Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan bidang.
- 2) Merumuskan kebijakan terkait riset, edukasi, pengembangan SDM, infrastruktur, permodalan, pemasaran, dan Hak Kekayaan Intelektual.
- 3) Mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan.
- 4) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terkait.
- 5) Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan.
- 6) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi.
- 7) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang.
- 8) Mengelola administrasi bidang.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

7. Bidang Pemuda dan Olahraga tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur kemitraan pemuda dan olahraga.
- b. Menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan dan sub kegiatan bidang sesuai tugas dan kebijakan.
 - 2) Merumuskan kebijakan dalam pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, kepramukaan, pembudayaan olahraga, dan infrastruktur olahraga.

- 3) Mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga.
- 4) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pemuda dan olahraga.
- 5) Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga.
- 6) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi.
- 7) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga.
- 8) Mengelola administrasi bidang.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai fungsi.

8. UPTD tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan dinas.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.